

RINGKASAN

DELA HARIANI
220510020

**PERAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN
KELAS II B LUBUK PAKAM DALAM
MEMENUHI KEBUTUHAN BIOLOGIS
BAGI NARAPIDANA YANG SUDAH
MENIKAH**

**(Nuribadah, S.H., M.H dan Albert Alfikri,
S.SY., M.H.I)**

Penelitian ini di latar belakang mengenai pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana yang telah menikah merupakan hak yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Pemasyarakatan. Namun, pemenuhan hak tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam belum terlaksana secara optimal karena overkapasitas, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum diterapkannya program Cuti Mengunjungi Keluarga. Kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik tersebut menjadi dasar penelitian untuk menganalisis peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dalam memenuhi kebutuhan biologis narapidana yang telah menikah, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan pemenuhan hak tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap regulasi terkait serta observasi langsung mengenai peran di Lapas Kelas II B Lubuk Pakam. Subjek penelitian melibatkan narapidana yang sudah menikah sebagai pihak terdampak langsung, serta petugas pemasyarakatan untuk mendapatkan perspektif mendalam mengenai kendala operasional dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam dalam memenuhi kebutuhan biologis narapidana belum berjalan secara optimal. Kendala struktural berupa fenomena overkapasitas hunian yang melampaui tiga kali lipat kapasitas ideal institusi. Keterbatasan ruang fisik tersebut mengeliminasi peluang penyediaan infrastruktur khusus di dalam lapas seperti bilik asmara. Sebagai langkah mitigasi terhadap implikasi psikologis dan gangguan stabilitas keamanan, otoritas lapas mengoptimalkan upaya alternatif melalui penguatan pembinaan mental serta pengawasan perilaku warga binaan.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan hak biologis merupakan instrumen rehabilitasi sosial yang sangat kontributif terhadap keberhasilan proses integrasi narapidana kembali ke masyarakat. Melalui temuan ini, diharapkan adanya dorongan bagi pemerintah untuk segera merumuskan regulasi turunan yang lebih teknis serta melakukan pembenahan infrastruktur fisik di lapas. Penataan ini esensial agar fungsi lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada penghormatan terhadap martabat manusia dan pemenuhan hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi.

Kata Kunci: Lembaga Permasyarakatan, Narapidana, Hak Biologis

SUMMARY

DELA HARIANI
220510020

THE ROLE OF CLASS II B CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN LUBUK PAKAM IN FULFILLING THE BIOLOGICAL NEEDS OF MARRIED PRISONERS

**(Nuribadah, S.H., M.H and Albert Alfikri,
S.SY., M.H.I)**

This research is grounded in the principle that the fulfillment of the biological needs of married inmates is a right that must be respected and upheld by the state, as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Correctional System Law. However, the fulfillment of this right at the Class IIB Lubuk Pakam Correctional Institution has not been optimally realized due to overcrowding, limited facilities and infrastructure, and the non-implementation of the Family Visit Leave program. This gap between legal provisions and actual practice forms the basis for analyzing the institution's role in meeting these needs, the obstacles encountered, and the efforts made to optimize the fulfillment of this right.

The study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through a review of relevant regulations and direct observation of operations at the Class IIB Lubuk Pakam Correctional Institution. Research subjects included married inmates as the directly affected parties and correctional officers, to gain in-depth perspectives on the operational challenges involved in fulfilling these rights.

The findings indicate that the role of the Class IIB Lubuk Pakam Correctional Institution in meeting the biological needs of inmates has not been optimal. Structural constraints include severe overcrowding, with the inmate population exceeding three times the institution's ideal capacity. This lack of physical space eliminates the possibility of providing specialized on-site infrastructure, such as conjugal visit rooms. To mitigate psychological impacts and potential security instability, prison authorities have optimized alternative measures by strengthening mental guidance and monitoring inmate behavior.

In conclusion, this research affirms that the fulfillment of biological rights serves as a social rehabilitation instrument that significantly contributes to the successful reintegration of inmates into society. These findings are intended to encourage the government to urgently formulate more detailed implementing regulations and to improve physical infrastructure within correctional institutions. This restructuring is essential to ensure that the function of correctional institutions

focuses not merely on punishment, but also on respect for human dignity and the fulfillment of fundamental rights guaranteed by the constitution.

Keywords: Correctional Institutions, Prisoners, Biological Right